

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PERKEBUNAN SAWIT RAKYAT PADA LAHAN GAMBUT

Febri Yuliani

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Implementation of Institutional Strengthening Policy for People's Oil Palm Plantation on Peatlands. The large contribution of palm oil to exports makes the palm oil determined by the government as a leading commodity in Indonesia. Moreover, from the perspective of the global economy, oil palm is a commodity which is a distinctiveness of Indonesia where Indonesia has a comparative advantage in palm oil production. The research objective is to find and implement appropriate institutional policies and encourage the people's palm oil industry to have added value for increasing competitiveness. This research was conducted using a survey method, in which qualitative data analysis was descriptive to express comprehensively the regulatory and institutional framework in the management of self-help oil palm farmers in Siak Regency. The results showed that the development of the plantation sub-sector which is part of regional development must be able to improve welfare and equitable and sustainable community prosperity in harmony with the available natural resource potential. So that the important role of plantations as a driver of the economy as a driver of the regional economy, supporting regional development, employment, driving the development of downstream industries, contributors to regional income, providers of foreign exchange and the important role of supporting the preservation of natural resources and the environment will increase.

Abstrak: Implementasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Perkebunan Sawit Rakyat pada Lahan Gambut. Besarnya kontribusi sawit terhadap ekspor membuat sawit ditetapkan pemerintah sebagai komoditas unggulan Indonesia. Lebih dari itu, dari perspektif ekonomi global, sawit adalah komoditas yang merupakan kekhasan Indonesia dimana Indonesia memiliki keunggulan yang komparatif dalam produksi sawit. Tujuan penelitian adalah menemukan dan mengimplementasikan kebijakan kelembagaan yang sesuai dan mendorong industri kelapa sawit rakyat agar memiliki nilai tambah bagi peningkatan daya saing. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei, dimana analisis data secara deskriptif kualitatif untuk mengungkapkan secara komprehensif terkait kerangka peraturan dan kelembagaan dalam pengelolaan petani kelapa sawit swadaya di Kabupaten Siak. Hasil penelitian menunjukkan pembangunan sub sektor perkebunan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah harus mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan selaras dengan potensi sumber daya alam yang tersedia. Sehingga peran penting perkebunan sebagai penggerak perekonomian sebagai penggerak perekonomian daerah, mendukung pengembangan wilayah, penyerapan tenaga kerja, pendorong pengembangan industri hilir, penyumbang pendapatan daerah, penyedia devisa negara serta peran pentingnya mendukung kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup akan semakin meningkat.

Kata Kunci: Kelembagaan, kelapa sawit, lahan gambut, implementasi kebijakan

PENDAHULUAN

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis, memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional. Secara ekonomi perkebunan kelapa sawit berfungsi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional; sedangkan secara ekologi berfungsi meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung, dan secara sosial budaya berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Ditinjau dari aspek produksi, hasil produksi perkebunan kelapa sawit merupakan bahan baku industri baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Apabila ditinjau dari bentuk pengusahaannya, usaha perkebunan kelapa sawit meliputi Perkebunan Kelapa sawit Besar Swasta, Perkebunan Kelapa Sawit Besar Negara dan Perkebunan Kelapa sawit Rakyat. Kontribusi besar komoditas belum akhirnya sawit dapat menjadi salah satu sektor andalan di Indonesia. Salah satu proses panjang tersebut adalah penguatan kelembagaan dan pembinaan perkebunan sawit rakyat se-

hingga industri maupun petani perkebunan sawit rakyat sama-sama menikmati kesuksesan bisnis sawit saat ini.

Sebagai salah satu komoditas unggulan, sawit memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Terdapat enam peran sawit bagi perekonomian nasional. Keenam kontribusi tersebut adalah : ekspor dan kontribusi devisa, penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, bahan baku industri dan penciptaan nilai tambah, pemerataan pembangunan ekonomi wilayah, serta penerimaan negara. Sebagai salah satu hasil produksi perkebunan, sawit memiliki peranan yang besar dalam ekspor Indonesia. Jika merujuk pada data Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) yang dikeluarkan Bank Indonesia tahun 2017, ekspor sawit Indonesia pada tahun 2016 mencapai US\$ 14,36 miliar. Walaupun mengalami penurunan dibandingkan total ekspor pada tahun 2015 yang mencapai US\$ 15,40 miliar, sawit tetap menjadi komoditas dengan sumbangan ekspor terbesar kedua di Indonesia, setelah ekspor batubara yang mencapai US\$ 14,56 miliar pada 2016. Sawit menyumbang 10 persen dari total ekspor Indonesia pada tahun 2016. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan ekspor minyak dan gas yang masing-masing berkontribusi sebesar 3 persen dan 5 persen dari total nilai ekspor nasional tahun 2016. Hal ini menunjukkan besarnya kontribusi usaha sawit terhadap pembentukan ekspor nasional.

Jika dibandingkan dengan komoditas perkebunan lainnya, maka akan terlihat perbedaan yang sangat signifikan dalam hal nilai ekspor. Pada tahun 2016, ekspor minyak sawit mencapai hingga US\$ 14,36 miliar sedangkan komoditas lainnya seperti biji kopi menyumbang ekspor sebesar US\$ 1,00 miliar. Jika dibandingkan dengan komoditas teh, tembakau dan biji coklat, maka nilai dari ketiga ekspor komoditas tersebut tidak ada yang lebih dari 0,6 persen dari total ekspor minyak sawit. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada sub sektor perkebunan, minyak sawit memberikan kontribusi terbesar bagi ekspor Indonesia.

Tingginya nilai ekspor sawit tentu mem-

berikan dampak yang signifikan bagi perekonomian nasional. Salah satu kontribusi besar dari ekspor sawit terhadap perekonomian adalah meningkatnya cadangan devisa nasional. Setiap ekspor menghasilkan cadangan devisa yang memiliki fungsi dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran aktivitas impor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2015 industri sawit menghasilkan devisa USD 18,6 miliar atau sekitar Rp. 250 triliun. Oleh sebab itu, tingginya nilai ekspor sawit akan berimplikasi terhadap peningkatan cadangan devisa yang dapat menjamin stabilitas perekonomian nasional.

Besarnya kontribusi sawit terhadap ekspor membuat sawit ditetapkan pemerintah sebagai komoditas unggulan Indonesia. Lebih dari itu, dari perspektif ekonomi global, sawit adalah komoditas yang merupakan kekhasan Indonesia dimana Indonesia memiliki keunggulan yang komparatif (*comparative advantage*) dalam produksi sawit. Hal tersebut didasarkan indikator RCA (*Revealed Comparative Advantage*). Pada tahun 2010 Kelapa sawit Indonesia merupakan komoditas berdaya saing dengan nilai RCA tertinggi yaitu sebesar 19,15 jauh diatas komoditas utama lainnya seperti karet 5,32; kakao 4,10; rotan 5,54; atau rumput laut yang hanya 0,27 (FAO 2011)

Kontribusi lainnya dari sawit terhadap perekonomian nasional adalah penyerapan tenaga kerja. Tumbuhnya sektor sawit memberikan kontribusi terhadap pembukaan lapangan kerja yang pada akhirnya berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja dan menurunnya jumlah pengangguran. Tingginya implikasi dari pertumbuhan sektor sawit terhadap penyerapan tenaga kerja tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa sektor sawit adalah sektor yang padat karya sehingga menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yang padat modal.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, kementerian Pertanian, jumlah tenaga kerja pada usaha sawit di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 5,4 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat diban-

dingkan tahun 2010 yang hanya menyerap 3,4 juta jiwa. Artinya, dalam kurun waktu 2010 – 2014, pertumbuhan pembukaan lapangan kerja pada usaha sawit mencapai 60,8 persen. Tingginya pertumbuhan pembukaan lapangan kerja usaha sawit dalam kurun waktu 2010-2014 disebabkan karena pesatnya perkembangan sektor sawit pada periode tersebut yang tercermin dari peningkatan ekspor sawit Indonesia yang dalam kurun waktu tersebut juga mengalami peningkatan hingga 29,6 persen, dari US\$ 13,47 miliar menjadi US\$ 17,46 miliar.

Walupun usaha sawit merupakan usaha sub sektor dari sektor pertanian, namun penyerapan tenaga kerja pada usaha sawit justru lebih tinggi jika dibandingkan beberapa usaha sektor lainnya dalam perekonomian nasional seperti sektor pertambangan dan penggalian maupun sektor lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan dan jasa. Pada tahun 2015 sektor pertambangan dan penggalian yang mencakup berbagai usaha pertambangan seperti batubara, nikel, tembaga hingga usaha minyak dan gas hanya mampu menyerap 1,3 juta tenaga kerja, atau hanya 24 persen dari tenaga kerja yang bekerja di usaha sawit yang mencapai 5,4 juta tenaga kerja. Sedangkan sektor lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan dan jasa pada tahun 2015 hanya menyerap 3,2 juta tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa usaha sawit yang merupakan salah satu bidang usaha pada sektor pertanian mampu menciptakan lapangan kerja yang besar di Indonesia termasuk di Kabupaten Siak.

Kabupaten Siak merupakan kabupaten dengan lahan gambut, yaitu suatu ekosistem dimana (dibawah kondisi jenuh air secara permanen) bahan tanaman mati dan yang telah/tengah mengalami perombakan (decay) terakumulasi untuk membentuk sebuah lapisan tanah yang tebal organik (gambut). Rata-rata per hektar karbon tanah menyimpan sepuluh kali lebih besar dari hutan tropis yang masih utuh. Hal ini membuat lahan gambut menjadi tempat penyimpanan (reservoir) karbon yang paling penting dan sangat terkonsentrasi di darat. Dalam hutan rawa gambut alami, selain sebagai produsen, hutan memfasilitasi kondisi

basah untuk pembentukan gambut, penyerapan dan penyimpanan karbon. Pengerinan dan konversi gambut akan membuatnya melepaskan karbon gambut lebih cepat daripada yang telah diserapnya (sequester). Emisi yang dihasilkan dari hutan rawa gambut yang dikonversi menjadi dan digunakan sebagai perkebunan (termasuk tindakan deforestasi dan drainase) dengan menggunakan asumsi siklus tegakan dua puluh lima tahun akan dikeluarkan hingga puluhan tahun berikutnya atau bahkan lebih lama lagi.

Penelitian ini berupaya mengungkap dan menganalisa bagaimana implementasi kebijakan penguatan kelembagaan dan pembinaan perkebunan sawit rakyat pada lahan gambut dalam rangka peningkatan daya saing.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei, dimana analisis data secara deskriptif kualitatif untuk mengungkap secara komprehensif terkait kerangka peraturan dan kelembagaan dalam pengelolaan petani kelapa sawit swadaya di Kabupaten Siak. Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer akan diperoleh melalui wawancara dan penyebaran angket (kuisisioner) untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai peraturan dan kelembagaan (petani kelapa sawit swadaya). Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari berbagai laporan penelitian, jurnal, laporan tahunan, laporan evaluasi, dokumen peraturan dan perundang-undangan dan dokumen lain yang relevan.

Peneliti memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lokasi dan objek penelitian, berperan serta dalam proses pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewajiban. Selain itu, peneliti menjalin hubungan dalam pergaulan dengan subjek penelitian baik selama maupun sesudah pengumpulan data; peneliti memainkan peran yang berbeda dari suatu tempat ke tempat lainnya, artinya berupaya untuk tidak terpengaruh oleh subjek penelitian; melakukan diskusi dengan rekan sejawat

setelah melakukan wawancara dan pengamatan serta melakukan editing, reduksi dan klasifikasi semua fakta, data dan informasi yang terekam secara utuh, mengelompokkan data, serta menganalisis temuan penelitian dan mengkomparasikan dengan sumber lainnya. Tahap selanjutnya dilakukan perumusan kategori, memberikan interpretasi dan memberikan eksplanasi terhadap masalah penelitian dan penulisan laporan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi sawit dalam pengentasan kemiskinan juga tidak hanya melalui penciptaan lapangan kerja juga berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui keterlibatannya yang aktif dari para pekebun rakyat dalam dinamika pembangunan sektor sawit. Dalam 20 tahun terakhir sektor sawit terus berkembang menjadi salah satu leading sektor di Indonesia. Walaupun terus berkembang menjadi salah satu sektor yang besar di Indonesia, sektor sawit tidak menggeser para pekebun rakyat, justru pekebun sawit rakyat terus berkembang menjadi semakin besar.

Semakin besarnya pekebun sawit rakyat dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian. Berdasarkan data yang dikeluarkan tahun 2015 tersebut, luas areal perkebunan sawit rakyat terus mengalami peningkatan sejak tahun 2006. Pada tahun 2006, luas areal kebun rakyat hanya sebesar 2.536,5 ribu Ha. Jumlah tersebut terus meningkat dan mencapai 4.551,5 ribu Ha pada tahun 2014. Sehingga dalam kurun waktu 2006 – 2014, luas area perkebunan rakyat pada tanaman kelapa sawit meningkat sebesar 79 persen.

Jika membandingkan dengan kondisi perkebunan rakyat komoditas perkebunan lainnya seperti karet, kelapa dan kakao, maka akan terlihat bahwa luas arean perkebunan rakyat di komoditas sawit meningkat jauh signifikan dibandingkan pada komoditas – komoditas perkebunan lainnya.

Jika luas areal perkebunan rakyat pada tanaman kelapa sawit selama periode 2006-

2014 meningkat sebesar 79,5 persen dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya 7,64 persen maka pada komoditas karet dan kakao hanya tumbuh masing-masing sebesar 8,12 persen dan 34,21 persen dengan rata-rata pertumbuhan tahun masing-masing sebesar 0,99 persen dan 3,8 persen. Sedangkan pada komoditas kelapa dan kopi, luas area perkebunan rakyat justru mengalami penurunan. Pada tahun 2006, luas area perkebunan rakyat komoditas kelapa sebesar 3.720,5 ribu Ha, lebih besar dari luas areal sawit perkebunan rakyat. Namun tahun 2014, jumlahnya hanya tinggal 3.592,6 ribu Ha atau turun sebesar 3,44 persen. Sama halnya kelapa, luas areal perkebunan kopi juga turun sebesar 0,6 persen dalam kurun waktu 2006-2014, dari 1.255 Ha menjadi hanya 1.198 ribu Ha.

Selain perkembangannya yang signifikan, hal yang menarik untuk dicermati dari areal perkebunan rakyat pada komoditas sawit adalah peningkatan luas arealnya jauh lebih pesat dibandingkan peningkatan luas areal perkebunan besar. Hal tersebut membuat terjadinya pergeseran persentase luas perkebunan rakyat dan perkebunan besar dalam komoditas sawit.

Semakin luasnya areal perkebunan rakyat komoditas sawit ini menandakan bahwa kemajuan sektor sawit tidak hanya dinikmati oleh perusahaan sawit besar tetapi juga dinikmati oleh para pekebun rakyat. Luasnya perkebunan sawit milik rakyat juga menandakan bahwa ekonomi para pekebun tumbuh sehingga dapat memperluas areal perkebunan. Bergeraknya ekonomi di para pekebun rakyat tentu memberikan dampak ekonomi terhadap para pekebun rakyat melalui peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan. Pendapatan yang meningkat tersebut pada akhirnya mampu mengeluarkan mereka dari garis kemiskinan. Sehingga jelas bahwa jika perkembangan komoditas sawit sudah memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan para pekebun rakyat dan mengeluarkan mereka dari garis kemiskinan.

Peran berikutnya dari komoditas sawit adalah sebagai bahan baku industri. Komodi-

tas sawit memiliki potensi yang sangat besar sebagai sebuah bahan baku industri dan diolah untuk menjadi produk-produk industri. Produk-produk industri yang merupakan produk olahan dari minyak kelapa sangatlah beragam mulai dari sabun, lilin, hingga kosmetik. Berbagai produk olahan dari minyak kelapa juga sangat bervariasi berdasarkan tingkat kesulitan dan ekstraksi produknya. Tingginya keragaman dari produk olahan komoditas sawit berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian pada tahun 2007 menunjukkan bahwa produk olahan dari komoditas sawit memiliki nilai tambah yang tinggi. Minyak kelapa sawit yang diolah menjadi minyak goreng sawit memiliki nilai tambah sebesar 60 persen, sedangkan jika menjadi margarin mencapai 180 persen, sabun mandi 300 persen, bahkan kosmetik nilai tambahnya mencapai 600 persen (Kementerian Perindustrian, 2011).

Besarnya potensi komoditas sawit sebagai bahan baku industri untuk diolah menjadi suatu produk perindustrian membuat komoditas sawit memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Di tengah fenomena deindustrialisasi dini yang dialami oleh Indonesia, pengembangan pengolahan komoditas sawit dapat menjadi salah satu solusi untuk mendorong kembali industri dalam negeri, terutama industri agro. Perkembangan industri tersebut, pada akhirnya, akan memberikan kontribusi besar baik dalam mendorong perekonomian nasional, penciptaan lapangan kerja, hingga meningkatkan kinerja ekspor.

Kontribusi lain dari pengembangan komoditas sawit adalah pemerataan pembangunan ekonomi wilayah di Indonesia. Hal ini dikarenakan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, produksi komoditas sawit terletak di provinsi-provinsi diluar Jawa. Provinsi Riau menjadi provinsi dengan produksi sawit terbesar di Indonesia dengan total produksi 2014 mencapai 7,037 juta ton sawit. Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah menjadi provinsi berikutnya dengan produksi sawit terbanyak, masing-masing memproduksi 4,753

juta dan 3,312 juta ton sawit sepanjang tahun 2014. Jika produksi sawit di provinsi-provinsi di pulau Sumatera dan Kalimantan diakumulasikan, lebih dari 95 persen produksi sawit nasional berasal dari kedua pulau tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Sumatera dan Kalimantan menjadi pusat produksi sawit nasional.

Produksi sawit yang tinggi di provinsi-provinsi tersebut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari tiga indikator yaitu pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan sektor pertanian, serta kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Berdasarkan tabel 1.5 di bawah dapat dilihat bahwa sejumlah provinsi mampu mencatatkan pertumbuhan PDRB dan pertumbuhan sektor pertanian yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional. Walaupun pada tahun 2014 pasar CPO global ditandai oleh rendahnya permintaan global dan rendahnya harga CPO, namun provinsi-provinsi penghasil sawit masih dapat tetap tumbuh.

Lebih dari itu, di beberapa provinsi yang selama ini mengandalkan sektor pertambangan dan migas seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, keberadaan usaha sawit membuat ekonomi di kedua provinsi tersebut masih dapat bertahan di tengah lesunya bisnis pertambangan dan migas. Terpukulnya sektor pertambangan dan migas di Kalimantan Timur juga dapat terlihat dari indikator ekspor di mana ekspor migas dan barang tambang turun sebesar 25 persen dan 20,5 persen. Disaat yang bersamaan, ekspor CPO justru mengalami peningkatan sebesar 36,6 persen.

Selain indikator ekspor, terpukulnya sektor pertambangan dan migas dapat terlihat dari indikator pertumbuhan sektoral. Pada tahun 2014, sektor pertambangan dan migas di Kalimantan Timur mengalami kontraksi sebesar 0,1 persen. Sektor pertanian justru mengalami pertumbuhan sebesar 5,1 persen, atau lebih besar dari pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur yang hanya sebesar 2 persen. Laju pertumbuhan sektor pertanian berada pada posisi baik karena adanya perbaikan sub sektor pertanian, salah satunya sub sektor perkebunan

terutama pada komoditas sawit. Selain itu, pada tahun 2014 juga tercatat masih terus terjadinya ekspansi lahan yang disertai dengan curah hujan yang mendukung menjadi faktor pendorong peningkatan produksi. Lebih lanjut, optimisme pengusaha untuk melakukan ekspansi di sub sektor kelapa sawit saat ini masih tinggi karena besarnya potensi permintaan ke depan yang dikonfirmasi oleh ekspektasi pelaku usaha lewat liaison KPw BI Prov. Kaltim (Bank Indonesia, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa usaha komoditas sawit tidak hanya menjadi pendorong pembangunan ekonomi di provinsi-provinsi di luar Jawa yang selama ini bukan pusat pertumbuhan otonomi nasional, tetapi juga menjadi penyelamat ekonomi di provinsi-provinsi yang ekonominya mengalami kejutan (*shock*).

Kontribusi ekonomi lainnya dari sub sektor kelapa sawit terhadap perekonomian nasional dapat ditelusuri dari sisi penerimaan negara. Meningkatnya penerimaan negara pada akhirnya akan memberikan tambahan penerimaan dalam APBN untuk membiayai sejumlah program pembangunan yang dapat mendorong ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, kontribusi sub sektor sawit terhadap penerimaan negara secara tidak langsung akan berdampak pada pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Salah satu kontribusi sub sektor kelapa sawit terhadap penerimaan negara adalah meningkatnya bea keluar dari ekspor kelapa sawit. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, komoditas sawit merupakan penyumbang ekspor terbesar kedua setelah ekspor batubara. Tingginya nilai ekspor sawit berdampak pada tingginya penerimaan negara yang didapat dari penguatan bea keluar ekspor sawit. Berdasarkan publikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, bea keluar yang didapat dari ekspor produk sawit dan turunannya pada tahun 2014 mencapai Rp 9,144 miliar (Rp 9,1 triliun). Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011-2013 yang selalu lebih dari Rp 13 triliun. Menurunnya bea keluar sawit tahun 2014 disebabkan oleh menurunnya nilai

ekspor sawit dan turunannya sebagai akibat dari lesunya pasar sawit global. Meskipun demikian, bea keluar yang didapat dari ekspor sawit pada tahun 2014 jauh lebih tinggi dari bea keluar kakao yang hanya mencapai Rp 176 miliar.

Meskipun demikian, kontribusi sub sektor sawit terhadap penerimaan negara diperkirakan lebih dari Rp 9,1 triliun. Hal itu mengingat banyak jenis pajak yang dikenakan kepada usaha sawit. Selain bea keluar, terdapat jenis pajak lain yang dibayarkan oleh usaha kelapa sawit, baik Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai, maupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamatkan pelaksanaan kebijakan pembangunan dari bawah secara partisipatif. Dalam rangka pelaksanaan otonomi, dimana pemerintah pusat memberikan wewenang terhadap daerah untuk mengatur rumah tangganya masing-masing. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan daerah mampu mandiri dan mengembangkan potensi daerahnya sesuai dengan potensi wilayah tersebut. Pemerintahan Daerah ini harapannya mampu memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, perubahan orientasi dari kekuasaan semata menjadi pelayanan publik seharusnya mampu mendorong adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Tujuan dari adanya otonomi daerah pada awalnya sangat mengutamakan pada kemandirian Daerah dalam segala hal termasuk dalam masalah pembiayaan daerah itu sendiri. Dengan demikian potensi daerah sangat memiliki peranan penting dalam menunjang pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan dengan potensi yang ada maka segala sesuatu yang ada di daerah tersebut dapat dikembangkan termasuk dalam bidang investasi dan pembangunan daerah di segala bidang. Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional, pemerintah daerah harus memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh pemerintahan pusat dan struktur tata pemerintahan, oleh

karena itu tujuan dan sasaran pembangunan harus memperhatikan permasalahan yang menjadi lingkup nasional maupun amanat pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Alokasi sumber daya daerah harus mendukung penyelesaian masalah nasional disamping menjadi masalah yang ada di daerah masing-masing.

Perkembangan perkebunan sawit di Provinsi Riau berkembang sangat cepat membutuhkan kesiapan masyarakat. Konflik yang terjadi terkait dengan perkebunan di seluruh Indonesia pada periode 3 tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya (Sawit Watch, 2009). Menurut Frasetiandy, 2009, semakin tinggi perluasan perkebunan kelapa sawit maka akan semakin tinggi pula persoalan konflik lahan atau agraria yang terjadi.

Pembangunan sub sektor perkebunan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah harus mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan selaras dengan potensi sumber daya alam yang tersedia. Sehingga peran penting perkebunan sebagai penggerak perekonomian sebagai penggerak perekonomian daerah, mendukung pengembangan wilayah, penyerapan tenaga kerja, pendorong pengembangan industri hilir, penyumbang pendapatan daerah, penyedia devisa negara serta peran pentingnya mendukung kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup akan semakin meningkat.

Dalam beberapa tahun terakhir ini pembangunan sub sektor perkebunan di Kabupaten Siak telah menunjukkan hasil yang cukup mengembirakan terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun bila dilihat dari aspek pemerataan dan sebaran lokasi masih kurang. Beberapa pola yang dilaksanakan dalam pengembangan komoditi perkebunan antara lain, pola perusahaan swasta, pola kemitraan, pola inti plasma dan pola swadaya. beberapa komoditi penting perkebunan yang dikembangkan antara lain adalah Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Kopi, Pinang dan Sagu.

Perkebunan mempunyai kedudukan yang

penting didalam pengembangan pertanian baik di tingkat nasional maupun regional di Kabupaten Siak yang mempunyai wilayah perkebunan yang luas. Dari data luas lahan dan produksi perkebunan memperlihatkan bahwa komoditas kelapa sawit memiliki nilai produksi dan luas lahan terbesar bila dibandingkan dengan komoditas lainnya dari lahan perkebunan, disusul dengan komoditas Karet. Tanaman perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Siak adalah Kelapa, Kelapa Sawit, Karet, Kopi Sagu dan aneka tanaman lainnya. Sentra produksi kelapa sawit terdapat di Minas, Tualang dan Dayun, Karet di Kerinci Kanan, Dayun dan Siak Sri Indrapura, sedangkan kelapa di Sungai Apit, Bunga Raya dan Tualang. Ada beberapa komoditi yang bias dikembangkan dan menunggu investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Siak, komoditi tersebut antara lain Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Kopi, Pinang, Kakao dan Sagu.

Total luas perkebunan di Kabupaten Siak adalah 305.225 Ha. Areal perkebunan terluas di Kabupaten Siak adalah perkebunan Kelapa Sawit dengan luas 287.331 Ha, kemudian disusul oleh perkebunan Karet seluas 15.770 Ha. Dengan kontribusi per tahun berkisar 12,10 persen dari PDRB dengan migas Kabupaten Siak; sektor tanaman perkebunan Siak merupakan subkategori perekonomian yang cukup menonjol. Produktivitas tanaman Kelapa Sawit di Kabupaten Siak pada tahun 2015 rata – rata sebesar 3,69 Ton/Ha. Industri Kelapa Sawit di Kabupaten Siak menghasilkan 969.234,00 ton CPO dan 60.975 ton minyak inti sawit per tahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2016, luas areal Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Siak mencapai 305.225 Ha. Dalam waktu 2 tahun akan dihasilkan CPO lebih dari 500.000 ton per tahun, mengingat semakin bertambahnya areal pengembangan, dan meningkatkannya tanaman yang mulai menghasilkan tandan buah sawit. Pasar industri olahan CPO terbuka baik lokal dalam negeri maupun internasional. Pasar lokal diantara datang dari Batam, Jawa, Kalimantan dan Sumatera sendiri. Pasar internasional

untuk memenuhi kebutuhan Singapura, Asia, Eropa dan Amerika.

Untuk meningkatkan nilai tambah diperlukan industri hilir CPO sehingga dapat dihasilkan minyak goreng, margarine, sabun dan lainnya. Kegiatan industri hilir CPO dapat dikembangkan secara integrated dalam kawasan industri Butun. Dari sekitar 500.000 ton CPO yang akan dihasilkan, masih sangat berpeluang ditawarkan kepada para investor untuk membangun industri hilirnya berupa 2-3 unit pabrik. Potensi pengembangan lahan untuk perkebunan sawit masih tersedia total 118.349 ha, dengan usulan pengembangan dari kecamatan-kecamatan di mulai dari tahun 2003. Selain perkebunan kelapa sawit yang menjadi peluang investasi di Kabupaten Siak yang perlu di tingkatkan adalah karet dan kelapa.

SIMPULAN

Pembangunan sub sektor perkebunan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah harus mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan selaras dengan potensi sumber daya alam yang tersedia. Sehingga peran penting perkebunan sebagai penggerak perekonomian sebagai penggerak perekonomian daerah, mendukung pengembangan wilayah, penyerapan tenaga kerja, pendorong pengembangan industri hilir, penyumbang pendapatan daerah, penyedia devisa negara serta peran pentingnya mendukung kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup akan semakin meningkat.

Dalam beberapa tahun terakhir ini pembangunan sub sektor perkebunan di Kabupaten Siak telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun bila di lihat dari aspek pemerataan dan sebaran lokasi masih kurang. Beberapa pola yang dilaksanakan dalam pengembangan komoditi perkebunan antara lain, pola perusahaan swasta, pola kemitraan, pola inti plasma dan pola swadaya. beberapa komoditi penting perkebunan yang dikembangkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Almasdi Syahza., 2005. Dampak Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Multiplier Effect Ekonomi Pedesaan di Daerah Riau, dalam *Jurnal Ekonomi*, Th. X/03/November/2005, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- Mustari. K. dan Mapangaja B., 2005. Analisis Daya Dukung Lingkungan untuk Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Gowa, dalam *Jurnal Ecocelebica*, Vo. 1 No. 2, Januari 2005, hal 104-109.
- Noor M. 2011. Pengelolaan Air di Tingkat Petani Pada Lahan Gambut Berbasis Masyarakat Kasus : UPT Lamunti, Kawasan PLG Kalimantan Tengah. Makalah disampaikan pada Lokakarya "Sistem Pengelolaan Air Lahan Rawa Gambut Berbasis Masyarakat" 4-6 Januari 2011, Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
- Riwandi. 2003. Indikator Stabilitas Gambut Berdasarkan Analisis Kehilangan Karbon Organik, Sifat Fisikokimia dan Komposisi Bahan Gambut. *Jurnal Penelitian UNIB. Bengkulu*. 9(1):25-36.
- Sa'id EG. 2001. Kemitraan di Bidang Agribisnis dan Agroindustri. Yayasan Mitra Pembangunan Desa. Business Innovation Centre of Indonesia. Jakarta.
- Suriadikarta DA dan MT Sutriadi. 2007. Jenis-Jenis Lahan Berpotensi untuk Pengembangan Pertanian di Lahan Rawa. *J. Litbang Pertanian*. 26 (3) 115 – 122.
- Suwondo, Sabiham, Sumardjo, B Pramudya. 2011. Analisis Keberlanjutan Pengelolaan Lahan Gambut Pada Agroekologi Perkebunan Kelapa Sawit. *J. Teknologi Lingkungan BPPT*. 2(1):161-170
- Suwondo, Sabiham, Sumardjo, B Pramudya. 2011. Efek Pembukaan Lahan Terhadap Karakteristik Biofisik Gambut pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Bengkalis. *J. Nature Indonesia*. 14(2): 143-149.